

ABSTRAK

Peristiwa migrasi telah terjadi sejak lama. Sebelum manusia memiliki tempat tinggalnya sendiri, manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden). Migrasi juga terjadi karena manusia belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, jika sumber pangan di tempat tersebut habis, maka akan berpindah ke tempat yang memiliki sumber pangan yang lebih banyak. Hukum migrasi secara baku baru diatur pada 1933, melalui perjanjian Versailles. Imigrasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia. Berdasarkan UDHR Pasal 4, menyebutkan kebebasan bergerak yang juga melingkupi bermigrasi. Meskipun migrasi merupakan hak, namun hak tersebut dapat dikurangi (*derogable*) sehingga hukum migrasi diperlukan.

Permasalahan yang akan dianalisa mengenai dampak hak anak imigran ilegal pasca Perintah Eksekutif Pemisahan Anak Imigran Ilegal. Dalam hubungannya dengan anak imigran, juga telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui hak anak dalam Perintah Eksekutif tersebut.

Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskripsi-analitis. Penelitian ini menganalisa Kebijakan Perintah Eksekutif Pemerintah Amerika Serikat mengenai pemisahan anak imigran ilegal ditinjau dari hukum Internasional yang berkaitan dengan imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu menggunakan norma hukum dalam mengkaji permasalahan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada dan dianalisa secara logis, dan sesuai fakta. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa aturan hukum, bahan hukum sekunder yaitu dengan buku dan referensi yang relevan, dan bahan hukum primer melalui kamus, dan media berita yang sesuai. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menjabarkan permasalahan sesuai fakta, dan data tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu dimulai dari permasalahan umum, untuk membahas permasalahan khusus.

Kebijakan Presiden Donald Trump mengeluarkan “*Executive Order*” bertujuan untuk mengurangi imigran ilegal. Meskipun demikian, anak imigran memiliki hak untuk pendidikan, catatan sipil, berekspresi, termasuk ditemani oleh orangtuanya. Secara terperinci dapat dilihat pada Pasal 9 *ICRC* anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya, kecuali dengan alasan tertentu. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum Internasional, dan Pemerintah Amerika Serikat wajib menyatukan kembali anak yang terpisah dari orangtuanya.

Kata Kunci: Kebijakan Imigrasi, Pemisahan Anak, Amerika Serikat.

ABSTRACT

Phenomenon of Migration had began for a long time ago. Before settled in one place, human moving from one to another place (nomaden),by depend on nature as their food supply (food gathering), human will migrate to fulfill their food. Specifically, immigration had regulated by the law in 1933, by Versailles Treaty. According to Article 4UDHR mention that Freedom of movement that also encircles migrating.Even migration is a right, it's should limited by (*derogable*) law of immigration.

Problem to be analyzed about impact immigrant children rights aftermath ofExecutive Order onChild Separation Illegal Migrant. Related with migrant child, had been regulated in Children Rights Convention. So, it's important to recognize children rights on Executive Order.

The research method is juridical-normative approach, by descriptive-analytical spesification..The study analyzes the United States government's executive order policy on the separation of illegal immigrant children with international law relating to immigration. The methodical approach is juridist normative thats study the problem based on legal norm.The research use descriptive analytic method to describe the problemthen analized logically factually. The research use legal regulation as primary legal refrence, law and legal literature as secondary legal refrence, and relevance dictionary and media as tertiary legal refrence. Qualitative analyze method as explain the problem factually and academically, then concluded deductifically from general to specific subject.

Immigration Policy by President Donald Trump to publish Executive Order for reduce Illegal Migrant. Event though every child have freedom to expression, speech, access to education, civil registration, and accompanied by parents or legal guardian. Spesificly,according to Article 9ICRCchild can not separated with the parents execept for special reason. Through the study concluded that the policy is contrary to international law andThe United States Government is obliged to reunite separate children from their parents.

Key Word: Immigration Policy, Children Separation, United States of America